

Altirelidiplomasi Sebagai KebijakanStrategis Politik Global

Ainur rizqi mubarrok^{1*1}, Ihsan Aji Santoso²²
^{1,2} Ilmu Administrasi Universitas Jember

*¹ sayarizqi22@gmail.com

*² iksanaji23@gmail.com

Abstract. Artikel ini membahas tentang kondisi kebijakan militer luar negeri negara-negara besar pasca perang dingin dalam memperluas pengaruhnya terhadap negara lain. negara besar sebagai contoh adalah Amerika, Korea Utara, dan Rusia yang sejauh ini telah mendominasi dalam kebutuhan militer global sebaga instrumen diplomasi. Penelitian kualitatif mencoba memaparkan penjelasan penjelasan, dan berbaga informasi lain seputar topik penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research atau penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari beberapa sumber cetak seperti buku, jurnal, artikel, laporan tertulis, situs internet dan sebagainya. hasil yang dijelaskan dalam artikel ini membuktikan bahwa militer tidak hanya digunakan sebagai instrumen keamanan negara, akan tetapi kekuatan militer juga digunakan sebagai instrumen diplomasi dalam upaya memperluas pengaruh terhadap negara-negara lain. Dalam prakteknya, kebijakan tersebut dapat berupa sebagai bantuan militer serta ancaman yang bertujuan tercapainya kepentingan politik sebuah negara atau bisa disebut dengan altileridiplomasi

1. Latar Belakang

Perang terbuka antara blok barat dan timur yang diprakarsarai oleh ambisi untuk memperluas pengaruhnya terhadap Negara lain menjadi sejarah baru geopolitik pasca perang dunia ke-II negara-negara di seluruh dunia sampai munculnya perang dingin. Perang Dingin merupakan suatu kondisi dunia yang hidup dalam bayangan perang nuklir, suatu kondisi dimana dunia diwarnai hubungan ketegangan bimbang karena pelatuk konflik perang nuklir masing-masing pihak siap meledak . Dalam perkembangannya, perang dingin semakin menuju puncak seiring dengan kompetisi militir antara Amerika dan Uni Soviet (Rusia). Masing-masing berusaha saling bersaing baik dalam segi kualitas ataupun kuantitas. Usaha peredaan ketegangan sudah dilakukan, namun sebegitu jauh masih bersifat ambivalen. Memasuki awal abad ke-20 seiring arus globalisasi telah terjadi perubahan drastis, perang dingin gagal terjadi dengan ditandai kejatuhan Uni Soviet berubah menjadi Republik Rusia serta mengakibatkan negara-negara komunis di Eropa Timur juga runtuh menanggalkan ideologi sosialisme-komunisme, sementara beberapa negara yang semula merupakan bagian Uni Soviet satu persatu memerdekakan diri.(Murtamadji, 2009)

Konflik ideologi-politik tersebut berimplikasi pada persaingan militer. Ibarat persaingan suatu perusahaan dalam pasar yang sama, mereka sama-sama berkompetisi mencari metode optimal untuk menghasilkan mekanisme pasar yang lebih menguntungkan. Uni Soviet berhasil ”menguasai” negara-negara Eropa Timur. Melihat hal ini AS tidak ingin “Finlandianisasi” kawasan Eropa akan terus berlangsung untuk itu dibentuklah aliansi NATO (North Atlantic Treaty Organization) pada tahun 1954. Sementara pada kawasan lain ia menjalin hubungan dengan Cina Nasionalis (1954), membentuk ANZUS (1951), SEATO (1954), serta mengadakan perjanjian dengan Iran, Turki dan Pakistan. Menanggapi kondisi ini, Uni Soviet membentuk WTO (Warsawa Treaty Organization) 1955, mendirikan Cominform (Communist Information Bureau), serta meningkatkan inovasi militer dengan berhasil diluncurkannya satelit sputnik (1957). Negara dunia ketiga menjadi obyek pertarungan mereka, oleh karena itu beberapa tidak mau terseret dalam kelompok ideologis antara dua super power. Lahirlah kelompok Non Blok yang ditandai dengan KTT I di Beograd (1961). (Salamah, 2008)

Pada masa modern ini, perang dilakukan mereka dengan misi untuk memperadabkan negara lain atau terkenal dengan istilah civilising mission (Watt & Mann, 2011). Ada perasaan superioritas dansah (legitimate) ketika mereka menyerbu negara lain. Atas nama demokrasi, Iraq, Libya, Afghanistan dan Iraq diserbu dan dihancurkan. Tidak ada satu pun yang berhasil dari perang yang dianggap civilizing mission itu atau untuk menegakkan demokrasi. Iraq menderita berkepanjangan. AS terpaksa angkat kakidari Afghanistan meninggalkan negeri itu, dan negeri itu menjadi antithesis terhadap peradaban Barat. Media berperan sangat besar dalam memframing semua Langkah Barat ini yang telah berhasil membentuk opini dunia agar berfihak pada mereka yang melakukan penyerbuan ini. (Hara, 2022)

Perkembangan situasi dunia, aktor, dan teknologi informasi tersebut, membuat arah diplomasi tradisional bergeser pada diplomasi yang lebih modern. Pola-pola yang digunakan dalam upaya menguasai sumber daya dan memperluas dominasi menjadi lebih pada instrumen intervensi militer antar negara dalam mencapai kepentingan politiknya atau bisa disebut dengan altirelidiplomasi

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif mencoba memaparkan penjelasan penjelasan, dan berbaga informasi lain seputar topik penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research atau penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari beberapa sumber cetak seperti buku, jurnal, artikel, laporan tertulis, situs internet dan sebagainya.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Kilas Balik Intervensi Militer Antar Negara

Altirelidiplomasi merupakan upaya menguasai sumber daya dan memperluas dominasi melalui instrumen intervensi militer antar negara dalam mencapai kepentingan politiknya. Intervensi adalah salah satu tindakan mencampuri urusan internal suatu negara yang bermaksud untuk memelihara serta mengubah situasi politik yang sedang berlangsung. Dalam pemikiran yang dikemukakan oleh J.G. Starke mengenai intervensi yaitu Intervensi sering diwujudkan dalam bentuk propaganda serta tindakan lainnya yang memicu timbulnya suatu revolusi atau perang saudara. Menurut Kalevi J. Holsti, salahsatu bentuk intervensi adalah Intervensi Militer (Christmas & Setiyono, 2019). Hal ini telah dilakukan oleh negara-negara dalam mencapai kepentingan politiknya, seperti kebijakan pengembangan senjata nuklir Korea Utara.

Seiring dengan perkembangan dan dinamika politik internasional, isu krisis nuklir Korea Utara telah berhembus sejak era 1990-an. Akan tetapi, pada saat itu dunia internasional masih belum memercayai isu tersebut. Korea Utara semakin mencengangkan dunia dengan mengeluarkan diri dari Perjanjian Non-Proliferasi Nuclear (NPT) pada tanggal 10 Januari 2003, dan pada tahun 2005 langsung mengklaim atas kepemilikan sejumlah senjata nuklir aktif yang tidak digunakan untuk kepentingan publik dan perdamaian akan tetapi untuk kepentingan militer.

Meningkatnya ketegangan di Asia Timur saat ini hanyalah sebuah episode dari perjalanan Korea Utara dalam mengembangkan senjata nuklirnya sejak tahun 1970. Pada 5 April 2009 lalu, Korea Utara akhirnya meluncurkan roket dari Musudan-ri, sebuah fasilitas militer di pesisir timur Korea Utara. Klaim Korut bahwa peluncuran roket ini adalah misi penempatan satelit komunikasinya dianggap sebagai tipuan oleh Amerika Serikat dan Jepang. Keduanya meyakini bahwa di balik alasan resmi tersebut Korea Utara berusaha menguji hasil pengembangan daya jangkau peluru kendalinya yang diperkirakan memiliki jangkauan hingga wilayah Alaska, sebagai bagian dari program senjata nuklir Korea Utara (Adam, 2023). Alasan utama Korea Utara dalam mempertahankan nuklirnya adalah untuk melindungi keamanan negaranya terutama dari agresi militer Amerika Serikat yang dipandang sebagai ancaman.

Maka, dengan cara diplomasi koersifnya ini pulalah, Korea Utara mengancam balik Amerika Serikat serta sekutu-sekutunya.

Korea Utara juga meyakini bahwa program nuklirnya adalah sarana (instrumen) diplomasi yang efektif untuk membawa Amerika Serikat terhadap meja negosiasi (perundingan), maupun sebagai suatu alat penjamin keamanan rejimnya. Dalam proses negosiasi itu, Korea Utara memercayai bahwa selain menjaga keamanan rejimnya, program nuklir itu juga akan bisa mendapat keuntungan ekonomi seperti program bantuan pangan, pendanaan, dan sebagainya. Oleh karena itu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Korea Utara mengejar program nuklir sebagai strategi inti agenda utama nasional. Dengan kata lain, Korea Utara menggunakan nuklir sebagai instrumen diplomasi dengan negara negara “lawan” demi meraih kepentingan nasionalnya.(P. & Z, 2010)

Selain Korea Utara, Amerika Serikat sebagai negara adidaya memiliki pengaruh yang kuat terhadap beberapa negara di dunia, termasuk Nigeria yang saat itu sedang berperang melawan pemberontakan Boko Haram. dalam melawan terorisme internasional Amerika Serikat memiliki kebijakan luar negeri yaitu *Bureau of Counterterrorism Programs and Initiatives*. Kerjasama kontra terorisme oleh Nigeria dan Amerika Serikat meningkat pada tahun 2013, setelah diadakannya pertemuan dalam The Global Counterterrorism Forum (GCTF) di Abuja. Dalam pertemuan ini Nigeria yang diwakili langsung oleh Presiden Goodluck E. Jonathan meminta bantuan secara resmi kepada Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan negara superpower dunia yang memiliki pengaruh yang besar dalam konstelasi politik internasional. Pasca kemenangannya pada perang dingin (cold war) negara ini berupaya memperluas hegemoninya di wilayah Afrika.(Pratiwi, 2022)

Amerika Serikat memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan strategisnya sesuai dengan US National Security Acts of 1947, yang merupakan undang undang untuk mempromosikan keamanan nasional. Amerika Serikat melihat ancaman yang dilakukan oleh kelompok teroris Boko Haram dapat mengancam keamanan di Afrika yang dapat menyebar ke wilayah luar Afrika, dan juga berpotensi menjadi ancaman langsung Amerika Serikat, dimana Amerika Serikat memiliki sejumlah kepentingan di wilayah tersebut. Amerika Serikat memberikan bantuan kepada Nigeria guna memberantas kelompok teroris Boko Haram melalui 3 bentuk yaitu *Arms Sale, Military Training, Technical Assistance* yang dilakukan dengan beberapa cara, pertama melalui program TSCP (*Trans-Sahara Counterterrorism Partnership*) yang merupakan program pemerintah AS yang didirikan pada tahun 2005 dengan tujuan utama memberikan pelatihan kontraterorisme dan kesiapan untuk menghadapi pemberontakan oleh kelompok kelompok ekstrimis di negara-negara Afrika Utara dan Afrika Barat, secara spesifik adalah Algeria, Burkina Faso, Kamerun, Chad, Mali, Mauritania, Moroko, Niger, Nigeria, Senegal, dan Tunisia. (Pratiwi, 2022)

Kedua, IMET (*International Military Education and Training*) Bantuan Amerika Serikat dalam rangka menangani kelompok militan Islam Boko Haram juga direalisasikan melalui program IMET (International Military and Educations Training). Program ini ditujukan untuk memberikan pelatihan terhadap personel angkatan bersenjata dan kepolisian Nigeria agar skill dan kemampuannya meningkat. Permintaan anggaran Departemen Luar Negeri AS untuk Internasional Military and Education training (IMET) untuk Nigeria pada tahun 2015 adalah sebesar \$ 700.00. Amerika Serikat dalam memberikan bantuan militernya kepada Nigeria berdasarkan kepentingan nasionalnya yang ada di Nigeria yang terancam akibat peningkatan aktivitas Boko Haram. Sebagaimana Nigeria adalah salah satu negara pemasok minyak terbesar AS. Cadangan minyak yang ada di Nigeria akan terus di pertahankan dari berbagai ancaman seperti, gangguan organisasi teroris Boko Haram yang bertentangan dengan pemerintah AS.

Akhir-akhir ini, Konflik Rusia dan Ukraina yang terjadi sejak awal 1990- an setelah keluar dari Uni Soviet menyebabkan kedua negara mengambil jalan yang berbeda secara politik dan ekonomi. Rusia ingin mengembalikan persatuan negara-negara bekas Uni Soviet, sementara Ukraina lebih memilih untuk lebih mendekat dan condong ke negara-negara Barat. Perbedaan kedua negara itu sangatlah mencolok.. Dalam Konflik Rusia Ukraina terjadinya perbedaan signifikan yang terlihat, yaitu bahasa, sejarah, dan juga sistem politiknya, namun, Vladimir Putin mengklaim berulang kali bahwa keduanya merupakan bagian yang sama dari awal peradaban Rusia, sementara Ukraina berkali kali menolak klaim tersebut. (De Ornay & Azizah, 2022)

Kepentingan nasional yang pertama bagi Rusia melakukan kebijakan intervensinya di Ukraina adalah kepentingan pertahanan. Menurut Morgenthau kepentingan pertahanan merupakan kepentingan suatu negara untuk melindungi bangsa, negara dan penduduk dari ancaman kekerasan fisik oleh negara lain. Hal tersebut sesuai dengan doktrin militer 2014 dalam pasal 8.a yang berbunyi;

Military security of the Russian Federation (hereinafter - military security) a state of protection of vital important interests of the individual, society and the state from external and internal military threats associated with the use of military force or threat of violence, characterized by the absence military threat or the ability to resist it.

Artinya (Keamanan militer Federasi Rusia (selanjutnya disebut keamanan militer) kepentingan sebuah negara untuk melindungi individu, masyarakat dan negara dari ancaman eksternal maupun internal yang terkait dengan penggunaan kekuatan militer atau ancaman kekerasan) Rusia, dalam kebijakan militernya untuk intervensi ke Ukraina memiliki alasan yang mana salah satunya adalah untuk melindungi keamanan negara dan warganya yang terancam. Rusia berhak melindungi segala kepentingannya serta melindungi negara dan bangsa Rusia, hal ini mengingat di Ukraina sendiri juga banyak terdapat warga Rusia ataupun etnis keturunan Rusia. Rusia merasa berhak untuk melindungi warganya yang tinggal disana. (De Ornay & Azizah, 2022)

Selain kepentingan untuk melindungi etnisnya, Rusia mempunyai kepentingan lain terkait dengan keberadaan pelabuhan Sevastopol. Sevastopol didirikan pada 1783 oleh Tsaritsa Rusia Katerina yang Agung di pesisir Barat Daya Semenanjung Krimea. Nama Sevastopol berasal dari bahasa Yunani yang berarti kota kejayaan yang terhormat, suci dan agung. Berdasarkan Traktat Persahabatan, Kerja Sama dan Kemitraan yang ditandatangani oleh Moskow dan Kiev pada 1997, Rusia mengakui status Sevastopol sebagai bagian dari Ukraina, sementara Ukraina memberi Rusia hak untuk mempertahankan pangkalan angkatan laut Sevastopol dan boleh menempatkan Armada Laut Hitam di Krimea hingga 2017. Dalam perjanjian tersebut Rusia dapat menempatkan personilnya hingga 25.000 dan 100 kapal perangnya. Keinginan Ukraina yang akan bergabung dengan NATO tidak dipungkiri akan memberi dampak buruk bagi keberadaan pangkalan atau basis militer Rusia yang berada di Sevastopol. karena jika Ukraina bergabung dengan NATO maka akan terjadi konfrontasi antara Rusia dan NATO di dalam satu wilayah negara. Sehingga hal tersebut akan mengancam keberadaan basis angkatan laut Rusia di pelabuhan Sevastopol yang masih berada dibawah otonom Ukraina. Hadirnya kekuatan militer Rusia di Ukraina akan memberi tekanan secara politik untuk Ukraina agar tetap menjadi negara netral yang tidak tergabung dalam kerjasama apapun dengan Barat, karena hakikatnya dalam mencapai kepentingannya suatu negara dapat melakukan paksaan terhadap negara lain dengan menggunakan powernya.

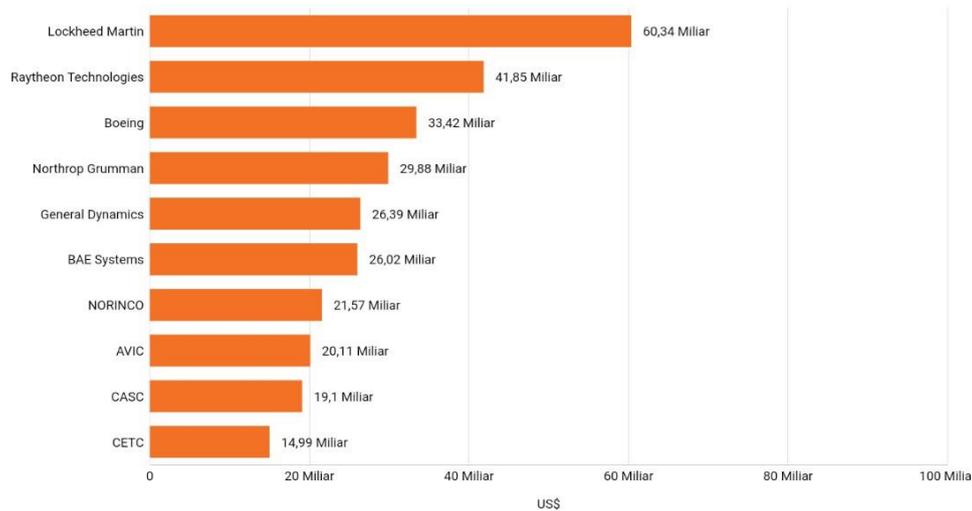
b. Dominasi Penjualan Senjata Sebagai Bentuk Intervensi

Menurut data Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), penjualan senjata di seluruh dunia cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Sepanjang tahun 2021 nilai penjualan senjata global tercatat mencapai US\$592 miliar, naik 7,6% dibanding 2020. Jika dibandingkan dengan dua dekade lalu, nilai penjualan senjata global selama 2002-2021 sudah melonjak 174%. Pada 2021, nilai penjualan senjata terbesar di dunia berasal dari Lockheed Martin, perusahaan asal Amerika Serikat (AS). Lockheed Martin pertama kali muncul sebagai produsen pesawat terbang sipil. Namun, dalam perkembangannya mereka juga membuat pesawat tempur, roket, rudal, radar militer, dan berbagai teknologi penunjang perang lain.

Pada 2021 Lockheed Martin tercatat membukukan penjualan senjata senilai US\$60,3 miliar. Hasil penjualan senjata ini berkontribusi 90% terhadap total penjualan perusahaan mereka, sekaligus menempatkannya di daftar puncak pedagang senjata global. Hal serupa dilakukan Boeing. Meski dikenal sebagai produsen pesawat terbang, Boeing turut memproduksi berbagai perlengkapan perang, di antaranya bom dan peluru kendali. Sepanjang 2021 Boeing mencetak US\$33,4 miliar dari hasil penjualan senjata, menyumbang 54% terhadap total penjualan perusahaan mereka. Selain dari AS, daftar top 10 pedagang senjata global dihuni oleh perusahaan asal Inggris dan Tiongkok, berikut rinciannya Lockheed Martin (AS): US\$60,34 miliar, Raytheon Technologies (AS): US\$41,85 miliar, Boeing (AS):

US\$33,42 miliar, Northrop Grumman (AS): US\$29,88 miliar, General Dynamics (AS): US\$26,39 miliar, BAE Systems (Inggris): US\$26,02 miliar, NORINCO (Tiongkok) : US\$21,57 miliar, Aviation Industry Corporation of China/AVIC (Tiongkok): US\$20,11 miliar. China Aerospace Science and Technology Corporation/CASC (Tiongkok): US\$19,10 miliar, China Electronic Technology Group Corporation/CETC (Tiongkok): US\$14,99 miliar

10 Perusahaan dengan Nilai Penjualan Senjata Terbesar Global (2021)



Sumber: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

Informasi Lain:

Dari data tersebut, membuktikan bahwa amerika serikat melalui Lockheed Martin mendominasi dalam penjualan senjata global. Hal ini bisa diasumsikan bahwa amerika serikat telah berhasil memperluas pengaruhnya terhadap negara-negara dunia. Mengingat senjata merupakan hal yang sensitif dalam kehidupan global. Melalui transaksi senjata tersebut, amerika serikat juga akan menyelipkan kepentingan-kepentingan politiknya terhadap negara lain sebagai konsumen. Hal ini dibuktikan saat amerika serikat dalam rangka membantu Nigeria untuk menghadapi kelompok terorisme di negaranya. Bantuan tersebut diberikan amerika serikat kepada Nigeria dikarenakan tanggungjawab atas kepentingan sumberdaya strategis amerika serikat bahwa Nigeria adalah pemasok minyak terbesar amerika. Sehingga dalam menjaga kepentingan strategis tersebut amerika tidak segan dalam memberikan bantuan militernya. Selain amerika, inggris dan tiongkok menjadi negara dengan penjualan tinggi setelah amerika serikat juga memiliki kepentingan dalam penjualan senjata terhadap konsumennya. Hal ini bisa diakumulasikan melalui banyaknya investasi negara produsen terhadap negara konsumen dalam pengelolaan sumberdaya alam ataupun kepentingan politik antar negara tersebut.

4. Kesimpulan

Perang dingin yang merupakan perang ideologis pasca perang dunia II telah berimplikasi terhadap tatanan dunia saat ini. Konflik yang terjadi antar negara menjadi bagian dalam pertarungan geopolitik internasional. Perebutan kekuasaan seperti yang dilakukan saat perang dunia I ataupun II melalui perang terbuka bukan menjadi jalan utama dalam melakukan ekspansi negara dalam mewujudkan kepentingan politiknya. Akan tetapi dengan melakukan intervensi militer terhadap negara-negara berkembang seperti menjadi pemasok persenjataan perangnya saat ini menjadi kebijakan strategis dalam menguasai sumberdaya ataupun memperluas pengaruh. Hal ini dianggap efektif karena keamanan dan kedaulatan negara menjadi utama dalam tatanan global. Bagi negara-negara yang tidak mempunyai kapasitas kuat

dalam militer, mereka memilih untuk bekerjasama dengan negara-negara besar untuk memenuhi kebutuhan militernya. Selain dengan melakukan pembelian senjata, negara berkembang akan menyepakati atas nilai yang lain seperti pemberian kuasa dalam pengelolaan sumberdaya ataupun kepentingan politiknya. Altirelidiplomasi sebagai kajian khusus dalam membahas peran strategis intervensi militer sebagai instrumen diplomasi negara-negara besar dunia.

References:

- [1] Adam, R. (2023). Analisis Strategi Nuklir Korea Utara Pasca Perang Dingin: Pengaruh Proliferasi Nuklir Korea Utara Terhadap Stabilitas Keamanan Asia Timur. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(3), 579–593. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v6i3.2547>
- [2] Christmas, S. K., & Setiyono, J. (2019). Intervensi Militer Terhadap Kudeta Politik Menurut Prinsip Jus Cogens. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 308–321. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.308-321>
- [3] De Ornay, E. S., & Azizah, N. (2022). Kepentingan Keamanan Nasional Rusia Dalam Serangan Militer Terhadap Ukraina Tahun 2022. *Jurnal Communitarian*, 4(1). <https://doi.org/10.56985/jc.v4i1.226>
- [4] Hara, A. E. (2022). *Non-Western International Relations : Kasus Peradaban*. 15–19.
- [5] Murtamadji, M. (2009). Kegagalan Perang Dingin Antardua Negara Adidaya: Faktor Penyebab Dan Implikasinya. *Humanika*, 9(1), 81–92. <https://doi.org/10.21831/hum.v9i1.3785>
- [6] P., A., & Z, A. S. (2010). Peran nuklir korea utara sebagai instrumen diplomasi politik internasional. *Ilmu Hubungan Internasional*, 7(2), 1–19.
- [8] Pratiwi, N. (2022). Bantuan Militer Amerika Serikat Kepada Nigeria Dalam Memberantas Kelompok Teroris Boko Haram Pada Tahun 2013-2019. *Mjir) Moestopo Journal International Relations*, 2(1), 43–51.
- [9] Salamah, L. (2008). Meninjau Kembali Konflik Perang Dingin: Liberalisme vs Komunisme. *Media Jurnal Global Dan Strategi*, 225–237. https://scholar.google.com/scholar?lookup=0&q=Meninjau+Kembali+Konflik+Perang+Dingin:+Liberalisme+vs+Komunisme&hl=id&as_sdt=0,5